

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional secara umum merujuk pada kajian mengenai interaksi antara negara-negara di dunia dalam berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, negara-negara saling berinteraksi, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional mereka. Hubungan Internasional melibatkan diplomasi, perjanjian, konflik, kerjasama, dan segala hal yang mempengaruhi dinamika antar negara. (Andrias, 2015)

Menurut J.C. Johari, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi antarnegara yang berdaulat serta studi tentang pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang prilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara

Putin sebagai pemimpin Rusia memiliki peran yang signifikan dalam merumuskan kebijakan luar negeri Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh idiosinkratik Putin dalam kebijakan luar negeri Rusia, dengan fokus pada studi kasus intervensi Rusia di Suriah. Pengaruh idiosinkratik Putin dalam perumusan kebijakan luar negeri Rusia mencerminkan cara pandang,

nilai-nilai, preferensi, dan prioritas yang dimilikinya. Dalam konteks intervensi Rusia di Suriah, Putin memiliki peran yang kuat dalam menentukan langkah-langkah yang diambil oleh Rusia dalam konflik tersebut.

Studi ini akan menganalisis tindakan-tindakan Rusia di Suriah, termasuk dukungan mereka terhadap rezim Bashar al-Assad, serta implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Rusia secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pengaruh idiosinkratik Putin dalam kebijakan luar negeri Rusia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi intervensi Rusia di Suriah. Dalam konteks Hubungan Internasional, studi tentang pengaruh idiosinkratik pemimpin dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara dibentuk. Dalam hal ini, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang peran individu dalam perumusan kebijakan luar negeri dan pentingnya faktor kepemimpinan dalam konteks global.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh idiosinkratik Putin dalam perumusan kebijakan luar negeri Rusia, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pengambil keputusan, diplomat, dan ahli Hubungan Internasional untuk memahami dinamika politik global dan mengantisipasi tindakan yang mungkin diambil oleh Rusia atau pemimpin lain di masa depan. Dalam kaitannya dengan studi kasus intervensi Rusia di Suriah, penelitian ini juga akan memberikan pemahaman tentang dinamika geopolitik di Timur Tengah dan peran Rusia sebagai pemain utama dalam konflik tersebut.

Intervensi Rusia di Suriah telah memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri Rusia dan dinamika regional di Timur Tengah.

Pengaruh idiosinkratik Vladimir Putin dalam perumusan kebijakan luar negeri Rusia dapat diamati dari beberapa aspek. Pertama, Putin telah menunjukkan sikap yang tegas terhadap campur tangan asing di dalam urusan negara lain. Pendekatan ini tercermin dalam intervensi Rusia di Suriah, di mana Rusia mendukung rezim Assad sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional Rusia di wilayah tersebut. Kedua, Putin memiliki visi yang kuat terkait pemulihan dan pemertahanan posisi Rusia sebagai kekuatan geopolitik global. Intervensi Rusia di Suriah dapat dipandang sebagai strategi untuk memperkuat posisi Rusia di panggung internasional dan menunjukkan kekuatan militer mereka.

Selain itu, Putin juga menggunakan intervensi di Suriah untuk membuktikan kemampuan militer Rusia, memperkuat citra nasionalisme Rusia, dan mengkonsolidasikan dukungan domestik terhadap pemerintahannya. Pengaruh idiosinkratik Putin juga tercermin dalam sikapnya terhadap isu-isu keamanan global. Putin telah menunjukkan ketegasan dalam memperjuangkan kepentingan nasional Rusia dan menghadapi tantangan seperti perluasan NATO, konflik di Ukraina, dan campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Rusia.

Namun, penting untuk diingat bahwa pengaruh idiosinkratik Putin dalam perumusan kebijakan luar negeri Rusia juga terkait dengan dinamika internal Rusia, termasuk struktur kekuasaan, sistem politik, dan faktor-faktor domestik

lainnya. Studi ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor idiosinkratik yang mempengaruhi Putin dalam merumuskan kebijakan luar negeri Rusia dan bagaimana hal tersebut berdampak pada intervensi Rusia di Suriah. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat lebih memahami peran individu dalam proses pengambilan keputusan politik dan pengaruhnya terhadap dinamika Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan implikasi yang lebih luas, baik dalam konteks hubungan Rusia dengan negara-negara lain, dinamika geopolitik di Timur Tengah, maupun dalam pemahaman tentang faktor-faktor idiosinkratik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam rangka merumuskan kebijakan luar negeri yang efektif, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor idiosinkratik yang mempengaruhi pemimpin dan aktor politik. Studi ini dapat memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengaruh idiosinkratik individu dapat memainkan peran kunci dalam kebijakan luar negeri suatu negara dan dampaknya terhadap dinamika Hubungan Internasional secara

2.1.2 Idiosinkratik

Idiosinkratik adalah karakteristik unik yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok, yang berbeda dengan karakteristik umum yang dimiliki oleh sebagian besar orang atau kelompok. Istilah Idiosinkratik berasal dari bahasa

Yunani yang terdiri dari kata "idios" yang berarti "pribadi" atau "khas" dan "synkrosis" yang berarti "campuran". (Agung, 2019)

Sigmund Freud adalah seorang ahli psikologi terkenal yang dikenal dengan teori psikoanalisisnya. Menurut Freud, Idiosinkratik merupakan salah satu konsep dalam psikologi yang mengacu pada karakteristik unik individu yang meliputi keinginan, kecenderungan, dan perilaku yang unik dari individu tersebut. Freud berpendapat bahwa Idiosinkratik merupakan hasil dari pengaruh pengalaman hidup dan trauma yang dialami individu selama masa kanak-kanak. Freud juga menyatakan bahwa Idiosinkratik dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan individu serta berdampak pada kesehatan mental individu. Konsep Idiosinkratik dapat membantu memahami mengapa individu bertindak atau berpikir dalam cara yang unik dan berbeda dengan orang lain. Namun, Freud juga menekankan bahwa pengaruh lingkungan dan sosial juga dapat mempengaruhi Idiosinkratik seseorang. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Idiosinkratik individu dalam mengevaluasi kesehatan mental seseorang. Idiosinkratik merujuk pada karakteristik unik atau khas yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau suatu sistem. Hal ini berarti bahwa sesuatu yang idiosinkratik memiliki ciri khas yang membedakannya dari yang lain.

Vladimir Putin lahir pada tanggal 7 Oktober 1952, di Leningrad (sekarang dikenal sebagai Saint Petersburg), Uni Soviet. Keluarganya memiliki pengalaman yang signifikan selama Perang Dunia II, ketika kota Leningrad dikepung oleh pasukan Jerman. Ayahnya, Vladimir Spiridonovich Putin, adalah seorang tentara

dan ibunya, Maria Ivanovna Putina, bekerja sebagai penjahit. Pengalaman keluarganya selama masa perang ini mungkin telah membentuk pandangan Putin tentang ketahanan dan kekuatan negara. Mereka mengalami masa-masa sulit selama pengepungan Leningrad, dan pengalaman ini mungkin telah memengaruhi sikapnya terhadap pertahanan negara dan upaya untuk menjaga stabilitas Rusia

Vladimir Putin memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Dia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Leningrad pada tahun 1975 dan kemudian bekerja sebagai perwira intelijen KGB. Pendidikan hukumnya dan pengalaman di KGB memengaruhi cara pandangya terhadap hukum dan keamanan nasional. Pendidikan ini membantu membentuk pemahamannya tentang isu-isu hukum internasional, termasuk implikasi hukum terkait intervensi militer di negara asing seperti Suriah. Kombinasi pendidikan dan pekerjaannya di KGB memberinya latar belakang yang kuat dalam isu-isu keamanan nasional dan intelijen.

Selama bertahun-tahun, Putin mengalami perjalanan panjang dalam kepemimpinan. Dia menjadi Wali Kota Saint Petersburg dan Perdana Menteri Rusia sebelum akhirnya menjadi Presiden. Pengalaman ini memberinya wawasan tentang tata kelola negara dan hubungan internasional. Selama masa kepemimpinannya, dia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk krisis ekonomi dan ketegangan dengan negara-negara Barat. Cara dia menanggapi tantangan ini dan bagaimana dia belajar dari pengalamannya sebagai pemimpin mungkin mencerminkan Idiosinkratiknya dalam mengambil keputusan terkait Suriah.

Selain faktor-faktor pribadi, afiliasi politik Putin juga memengaruhi Idiosinkratiknya. Dia adalah anggota Partai Bersatu Rusia (United Russia Party), partai yang mendukungnya dalam perjalanan politiknya. Kaitannya dengan partai ini, serta hubungannya dengan elit politik Rusia, seperti oligarki dan pejabat tinggi, berperan penting dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan selama masa pemerintahannya. Interaksi dengan aktor-aktor politik ini juga dapat membentuk pandangan dan sikapnya terhadap isu-isu internasional, termasuk Suriah. Hubungannya dengan oligarki dan elit bisnis juga telah mempengaruhi kebijakan ekonomi dan energi Rusia, yang dapat memengaruhi intervensi di Suriah.

Pengetahuan Putin tentang masalah dalam dan luar negeri diperoleh melalui berbagai sumber. Selama kariernya di KGB, dia mengumpulkan informasi intelijen yang mungkin telah memengaruhi pandangan dan pemahamannya tentang ancaman dan peluang global. Aksesnya ke tim penasihat dan sumber daya pemerintah memberinya pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu politik, ekonomi, dan keamanan. Pengetahuan ini menjadi pondasi penting dalam pengambilan keputusan selama intervensi Rusia di Suriah. Dalam pengambilan keputusan terkait Suriah, pengetahuannya tentang sejarah dan dinamika Timur Tengah juga mungkin telah memainkan peran penting.

Faktor-faktor idiosinkratik ini saling terkait dan membentuk pola pemikiran unik Vladimir Putin sebagai pemimpin Rusia. Memahami aspek-aspek ini adalah langkah penting dalam menggali pengaruhnya dalam konteks intervensi Rusia di Suriah. Analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor

ini berinteraksi dan saling memengaruhi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Idiosinkratiknya dalam intervensi tersebut. Dengan memahami Idiosinkratik Putin, kita dapat merasakan bagaimana faktor-faktor ini bersatu dalam kebijakan dan tindakan pemerintah Rusia di Suriah.

Tingkatan-tingkatan idiosinkratik merujuk pada variasi atau derajat keunikannya dalam pola perilaku atau karakteristik individu. Berikut adalah beberapa tingkatan idiosinkratik yang umum dikenal:

1. Idiosinkratik pribadi: Merujuk pada keunikan individu secara umum, seperti preferensi, kebiasaan, dan tindakan yang spesifik pada seseorang. (Cervone & Pervin, 2019)
2. Idiosinkratik organisasional: Merujuk pada keunikan yang berkaitan dengan organisasi atau lembaga tertentu, seperti kebijakan, budaya kerja, atau norma yang unik dalam lingkungan organisasi. (Schein, 2016)
3. Idiosinkratik nasional: Merujuk pada keunikan yang terkait dengan negara atau bangsa tertentu, termasuk kebijakan politik, sistem hukum, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. (Katzenstein, 2009)

Dalam konteks Vladimir Putin, tingkatan idiosinkratik yang paling relevan adalah Idiosinkratik pribadi dan Idiosinkratik nasional. Putin telah terkenal dengan gaya kepemimpinan yang kuat, kebijakan luar negeri yang tegas, dan penekanan pada kekuatan dan stabilitas Rusia. Kepribadian Putin yang karismatik, otoriter, dan pragmatis diyakini memiliki pengaruh signifikan dalam perumusan

kebijakan luar negeri Rusia. Selain itu, sebagai seorang pemimpin negara, Putin juga mencerminkan Idiosinkratik nasional Rusia yang mencakup nilai-nilai, kepentingan, dan aspirasi yang unik bagi negara tersebut.

Salah satu definisi mengenai idiosinkratik adalah menurut Carl Gustav Jung, seorang psikolog terkenal. Jung menyatakan bahwa Idiosinkratik merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman pribadi yang membentuk kepribadian individu. Menurutnya, setiap individu memiliki keunikan dan perbedaan dalam cara mereka memandang dunia dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Idiosinkratik juga dapat merujuk pada keunikan atau kekhasan dalam bidang seni, seperti gaya seni, penampilan visual, atau interpretasi kreatif. Dalam seni, Idiosinkratik sering kali dianggap sebagai nilai tambah yang membuat karya menjadi unik dan berbeda dari yang lain.

Dalam konteks kebijakan luar negeri, idiosinkratik dapat merujuk pada karakteristik khusus atau preferensi pemimpin negara yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Setiap pemimpin memiliki kepribadian, latar belakang, dan pandangan yang berbeda-beda, yang kemudian membentuk pendekatan idiosinkratik mereka dalam hubungan internasional.

Pengaruh idiosinkratik Vladimir Putin dalam perumusan kebijakan luar negeri Rusia dapat mencakup keputusan dan preferensi yang unik yang dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai mantan agen KGB dan pengalaman masa lalunya. Faktor-faktor idiosinkratik seperti pandangan politik, aspirasi

nasional, dan pendekatan keamanan juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia. Dalam studi kasus intervensi Rusia di Suriah, penelitian skripsi akan mengeksplorasi pengaruh idiosinkratik Putin dalam mempengaruhi keputusan dan strategi Rusia dalam intervensi tersebut. Pengertian dan pemahaman terhadap faktor idiosinkratik individu dalam perumusan kebijakan luar negeri merupakan kontribusi penting dalam menganalisis hubungan antara pemimpin dan kebijakan suatu negara. Dengan memahami pengaruh idiosinkratik dalam perumusan kebijakan luar negeri, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang dinamika dan faktor yang mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam hubungan internasional. Melalui analisis idiosinkratik, kita dapat mengenali perbedaan dan keunikan dalam pendekatan suatu negara terhadap masalah global dan mengapresiasi keragaman dalam diplomasi internasional.

Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan konsep idiosinkratik adalah Sigmund Freud, seorang psikoanalisis yang mengembangkan teori kepribadian yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup individu. Menurut Freud, setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan seringkali menyimpan traumatis, yang mempengaruhi perilaku dan kepribadian mereka secara unik.

Sementara itu, di bidang politik dan hubungan internasional, konsep Idiosinkratik sering digunakan untuk menjelaskan karakteristik kepemimpinan yang unik dari pemimpin suatu negara. Contohnya adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia yang sering dianggap memiliki kepribadian yang idiosinkratik dan mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia, seperti intervensi di Suriah. Namun, penting untuk diingat bahwa istilah Idiosinkratik juga dapat berdampak negatif

pada individu atau kelompok. Idiosinkratik yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial atau kebingungan dalam komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep Idiosinkratik sangat penting untuk menghindari diskriminasi atau kebencian yang tidak sehat terhadap individu atau kelompok yang memiliki karakteristik yang berbeda. Idiosinkratik merujuk pada karakteristik khusus Vladimir Putin yang berdampak pada proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri Rusia terkait intervensi di Suriah.

Vladimir Putin, sebagai pemimpin Rusia yang kuat, memiliki karakteristik idiosinkratik yang unik dalam cara ia memahami dan merumuskan kebijakan luar negeri Rusia. Kepemimpinan Putin ditandai oleh pendekatan otoriter dan penggunaan kekuatan politik yang kuat. Idiosinkratik ini mempengaruhi cara Putin memandang peran Rusia dalam urusan internasional dan merumuskan kebijakan luar negeri terkait dengan intervensi di Suriah.

Putin memiliki kontrol yang kuat atas proses pengambilan keputusan di Rusia. Hal ini memungkinkannya untuk menggunakan kebijakan luar negeri sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan Rusia, termasuk dalam intervensi di Suriah.

Keputusan Putin terkait kebijakan luar negeri Rusia, terutama intervensi di Suriah, tercermin dari karakteristik idiosinkratiknya dan cara uniknya dalam memahami dan merumuskan kebijakan. Idiosinkratik Putin juga mencakup faktor-faktor pengaruh pribadinya, seperti pengalaman masa lalu, pandangan politik, dan

hubungan pribadi dengan pemimpin negara lain. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada keputusan Putin terkait intervensi di Suriah. Sebagai pemimpin yang karismatik, Putin memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan kebijakan luar negeri Rusia. Faktor-faktor idiosinkratiknya dapat mempengaruhi pandangan dan tindakan pemerintah Rusia terkait dengan Suriah dan bagaimana intervensi dilaksanakan. Keinginan Putin untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh Rusia di panggung internasional dapat menjadi faktor penting dalam intervensi Rusia di Suriah.

Idiosinkratik Putin juga dapat mencerminkan prioritasnya dalam perumusan kebijakan luar negeri. Putin cenderung memprioritaskan kepentingan nasional Rusia, termasuk dalam intervensi di Suriah, dan hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari Idiosinkratik kepribadiannya.

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian keputusan, strategi, dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dan interaksi dengan negara lain di tingkat internasional. Kebijakan luar negeri bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional, baik dalam hal politik, ekonomi, keamanan, maupun sosial. Melalui kebijakan luar negeri, suatu negara berupaya membangun kerjasama, menjaga stabilitas regional, dan mencapai tujuan nasional yang lebih luas.

Menurut K.J Holsti, kebijakan luar negeri merupakan suatu ide serta gagasan dalam membentuk suatu rumusan dengan tujuan untuk memecahkan

adanya suatu permasalahan maupun bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam suatu wilayah

Kebijakan luar negeri melibatkan berbagai elemen, termasuk diplomasi, perjanjian internasional, perdagangan, bantuan luar negeri, dan partisipasi dalam organisasi internasional. Negara akan merumuskan kebijakan luar negeri berdasarkan prinsip-prinsipnya sendiri, faktor-faktor politik, keamanan, dan ekonomi, serta dinamika hubungan internasional yang sedang terjadi. (Shintaloka P. S., 2021)

Tujuan umum dari kebijakan luar negeri adalah menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan nasional. Negara akan menjalankan kebijakan luar negeri untuk mempromosikan kepentingan ekonomi nasional, membuka pasar baru, dan menjaga hubungan perdagangan yang menguntungkan. Selain itu, kebijakan luar negeri juga berperan dalam menjaga perdamaian, memperkuat kerjasama regional, serta mempengaruhi dan memperoleh dukungan dari negara-negara lain dalam berbagai isu global. (Rachmaniyah, A., & Fuady, K, 2014)

Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, negara mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan nasional, stabilitas regional, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan luar negeri juga mencakup upaya diplomasi, negosiasi, dan mediasi dalam menyelesaikan konflik internasional serta mengedepankan penyelesaian damai dalam perselisihan antarnegara. Negara dapat mengadopsi kebijakan luar negeri yang pro-aktif, yakni aktif terlibat dalam berbagai isu global dan memainkan peran sebagai pemimpin regional atau global.

Di sisi lain, negara juga dapat menerapkan kebijakan luar negeri yang netral, di mana mereka berusaha untuk menjaga netralitas dan kemandirian dalam menghadapi konflik atau perselisihan antarnegara.

Kebijakan luar negeri juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam negeri seperti opini publik, kepentingan kelompok politik atau ekonomi, dan dinamika politik domestik. Negara juga dapat mengubah kebijakan luar negeri mereka dalam merespons perubahan situasi internasional atau pergeseran dalam prioritas nasional. Melalui kebijakan luar negeri, negara juga dapat memainkan peran dalam mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, atau penyebaran senjata nuklir. Negara dapat berpartisipasi dalam forum-forum internasional dan organisasi multilateral untuk mempengaruhi kebijakan global dan mempromosikan kerjasama antarnegara.

Kebijakan luar negeri juga mencakup upaya membangun hubungan diplomatik dengan negara lain melalui pendirian kedutaan besar, pertukaran diplomatik, dan kunjungan resmi antara pemimpin negara. Melalui hubungan diplomatik ini, negara menjalin komunikasi dan negosiasi untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga kepentingan nasional. Selain itu, kebijakan luar negeri juga berperan dalam menjaga kepentingan dan keamanan warga negara yang berada di luar negeri, termasuk dalam hal evakuasi dalam situasi darurat atau konflik.

Dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam dinamika hubungan internasional, negara terus mengadaptasi kebijakan luar negeri mereka agar tetap relevan dan efektif. Kebijakan luar negeri yang baik haruslah responsif, fleksibel,

dan didukung oleh analisis yang akurat terhadap perkembangan global. Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri merupakan instrumen penting bagi suatu negara dalam menjaga kepentingan nasionalnya, membangun kerjasama internasional, serta mempengaruhi dinamika hubungan antarnegara.

Kebijakan luar negeri adalah serangkaian tindakan, keputusan, dan strategi yang diambil oleh pemerintah suatu negara dalam rangka menjalin hubungan dan berinteraksi dengan negara-negara lain di dunia. Tujuan dari kebijakan luar negeri adalah untuk mempromosikan kepentingan nasional negara tersebut dalam hubungan internasional, seperti perdagangan, diplomasi, keamanan, dan hubungan politik. Kebijakan luar negeri dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui dialog bilateral dengan negara-negara lain, kerja sama internasional, atau tindakan-tindakan yang lebih keras seperti sanksi atau intervensi militer. (Lovell, 1970)

Kebijakan luar negeri dapat berkaitan dengan perdagangan, diplomasi, keamanan, hak asasi manusia, lingkungan, atau isu-isu lainnya yang dianggap penting oleh negara tersebut. Kebijakan luar negeri juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ideologi, politik domestik, atau faktor-faktor ekonomi dan keamanan internasional. Kebijakan Luar Negeri secara umum merujuk pada serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dan interaksi dengan negara-negara lain di tingkat internasional.

Kebijakan luar negeri mengacu pada keputusan dan strategi yang diambil oleh pemerintah Rusia, khususnya dipengaruhi oleh karakteristik idiosinkratik Putin, dalam konteks intervensi di Suriah. Kebijakan luar negeri mencakup berbagai aspek, termasuk diplomasi, perdagangan internasional, kerjasama regional, dan intervensi militer. Tujuan umum dari kebijakan luar negeri adalah melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional negara tersebut.

Intervensi Rusia di Suriah adalah salah satu contoh konkret dari kebijakan luar negeri Rusia. Intervensi ini melibatkan campur tangan langsung dalam konflik Suriah dengan dukungan militer dan politik terhadap pemerintah Bashar al-Assad. Pengaruh idiosinkratik Vladimir Putin dalam perumusan kebijakan luar negeri Rusia menunjukkan bahwa karakteristik pribadi Putin, termasuk kepemimpinan otoriter, penggunaan kekuatan politik yang kuat, dan prioritas kepentingan nasional Rusia, memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait intervensi di Suriah.

Idiosinkratik Putin juga mencakup sentralisasi keputusan di tangan pemimpin Rusia. Hal ini memungkinkan Putin untuk memiliki kontrol yang kuat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, termasuk dalam intervensi di Suriah. Penting untuk memahami pengaruh idiosinkratik Putin dalam kebijakan luar negeri Rusia karena hal itu dapat membantu menjelaskan mengapa Rusia memilih untuk terlibat secara aktif di Suriah, meskipun kontroversial dan bertentangan dengan beberapa negara dan aktor internasional.

2.1.4 Pertahanan Nasional

Pertahanan Nasional secara umum merujuk pada upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan keamanan, kedaulatan, integritas, dan kepentingan nasionalnya dari ancaman eksternal dan internal. Tujuan utama dari pertahanan nasional adalah menjaga keamanan dan stabilitas negara, melindungi wilayah dari invasi atau agresi, serta memastikan kelangsungan fungsi-fungsi pemerintahan dan masyarakat. (Febriani, A. R., 2022)

Menurut Barry Buzan (1991) menyatakan bahwa pertahanan nasional mencakup segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk melindungi kepentingan vitalnya, termasuk upaya militer, diplomasi, dan upaya non-militer seperti keamanan energi, lingkungan, dan kesehatan.

Pertahanan nasional mencakup berbagai aspek, termasuk pertahanan militer, kebijakan keamanan, intelijen, perlindungan sipil, dan kesiapsiagaan nasional. Semua ini bekerja bersama untuk membentuk sistem pertahanan yang komprehensif. (Nizam Syahputra A, 2016)

Pertahanan nasional melibatkan pengembangan dan penguatan kekuatan militer, seperti angkatan bersenjata, yang mencakup angkatan darat, laut, udara, serta pasukan khusus. Tujuannya adalah untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi ancaman dari luar. Pertahanan nasional juga melibatkan pengembangan teknologi pertahanan, termasuk pengembangan

senjata, sistem pertahanan rudal, dan teknologi canggih lainnya, untuk memastikan keunggulan dalam pertahanan.

Selain itu, pertahanan nasional juga mencakup aspek non-militer, seperti kebijakan keamanan nasional, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan terhadap serangan siber, pengendalian perbatasan, serta pengawasan terhadap kegiatan teroris dan kejahatan lintas negara. Pertahanan nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik, seperti hubungan antarnegara, konflik regional, dan dinamika keamanan global. Faktor-faktor ini mempengaruhi strategi dan kebijakan pertahanan nasional yang diadopsi oleh suatu negara.

Pentingnya pertahanan nasional terletak pada perlindungan terhadap ancaman-ancaman yang dapat membahayakan integritas dan kepentingan nasional suatu negara. Ini meliputi ancaman militer, serangan teroris, konflik suku, perang cyber, dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu kestabilan. Pertahanan nasional juga memiliki dimensi pencegahan, yaitu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terjadinya konflik atau serangan. Ini meliputi diplomasi, negosiasi, kerjasama internasional, dan upaya untuk membangun kepercayaan dengan negara-negara lain. (Ditamei, 2022)

Perumusan kebijakan pertahanan nasional melibatkan pemilihan dan alokasi sumber daya yang tepat, termasuk anggaran pertahanan, untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara. Ini mencakup pengadaan senjata, pelatihan personel, dan pengembangan infrastruktur pertahanan. Pertahanan nasional juga melibatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam konteks aliansi militer

atau perjanjian keamanan Bersama. Ini dapat mencakup pertukaran intelijen, latihan militer bersama, dan kerjasama dalam pengembangan teknologi pertahanan. (Pranowo, 2010)

Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mempengaruhi pertahanan nasional dengan mempercepat aliran informasi, memungkinkan interkoneksi yang lebih baik antara sistem pertahanan, serta meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan merespons ancaman. Pertahanan nasional juga dapat melibatkan upaya perlindungan terhadap ancaman non-tradisional, seperti bencana alam, wabah penyakit, perubahan iklim, dan tantangan lingkungan lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas nasional.

Pertahanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat sipil. Masyarakat dapat berperan dalam upaya pengamanan, melalui partisipasi dalam program pencegahan, pelaporan kegiatan mencurigakan, dan mendukung kebijakan keamanan nasional. Pertahanan nasional juga dapat berdampak pada hubungan internasional dan diplomasi. Strategi dan kebijakan pertahanan suatu negara dapat mempengaruhi persepsi negara lain terhadap kekuatan dan niat negara tersebut.

Pertahanan nasional yang efektif juga melibatkan evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus terhadap perkembangan keamanan global dan ancaman yang berkembang. Hal ini memungkinkan negara untuk mengadaptasi strategi dan kebijakan pertahanan sesuai dengan perubahan lingkungan keamanan. Kerjasama

regional dan internasional dalam bidang pertahanan juga dapat berkontribusi pada kestabilan regional dan global. Ini mencakup perjanjian keamanan bersama, forum keamanan regional, dan kerjasama dalam penanggulangan ancaman bersama.

Pertahanan nasional yang efektif juga melibatkan aspek sumber daya manusia, dengan melibatkan personel yang terlatih dan berkualitas dalam angkatan bersenjata dan lembaga pertahanan lainnya. Pertahanan nasional juga melibatkan konsep perencanaan jangka panjang, yang melibatkan analisis risiko, peramalan kebutuhan pertahanan masa depan, dan pengembangan kemampuan yang sesuai dengan perubahan ancaman dan teknologi.

Pertahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan pemulihan pasca-konflik. Ini melibatkan upaya pemulihan dan rekonsiliasi setelah konflik serta upaya untuk membangun perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Pertahanan nasional juga memerlukan adanya sistem pengawasan dan akuntabilitas, baik dalam hal pengelolaan sumber daya pertahanan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan. (Armawi, 2020)

Dalam era globalisasi dan saling ketergantungan, kerjasama internasional dalam bidang pertahanan menjadi semakin penting. Ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan kerjasama dalam penanggulangan ancaman transnasional. Pertahanan nasional juga dapat melibatkan upaya dalam membangun kepercayaan dengan negara-negara lain melalui dialog, kerjasama, dan pemahaman bersama.

Pertahanan nasional tidak hanya terbatas pada dimensi konvensional, tetapi juga melibatkan aspek cyber security. Perlindungan terhadap serangan siber dan keamanan informasi menjadi semakin penting dalam menjaga keamanan nasional. Pertahanan nasional juga dapat mempengaruhi kebijakan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan kebijakan luar negeri. Hal ini karena pertahanan nasional dapat mempengaruhi citra dan reputasi suatu negara di tingkat internasional. Pertahanan nasional bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan nasional. Upaya pertahanan nasional harus selaras dengan pembangunan ekonomi dan sosial untuk mencapai tujuan pembangunan negara secara keseluruhan.

Pertahanan nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, militer, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dalam kolaborasi ini, pertahanan nasional dapat ditingkatkan dan keamanan nasional dapat terjaga dengan lebih baik.

2.1.5 Intervensi

Intervensi adalah tindakan yang dilakukan oleh satu negara atau pihak yang terlibat untuk campur tangan dalam urusan internal negara lain dengan tujuan mempengaruhi atau mengubah kebijakan atau kondisi di negara yang menjadi sasaran intervensi. (Monica, 2023)

Menurut ahli hukum internasional, Sean D. Murphy, "intervensi" adalah campur tangan oleh suatu negara atau pihak ketiga di dalam urusan dalam negeri suatu negara lain dengan cara yang merugikan kemerdekaan, kedaulatan atau

integritas teritorial negara tersebut, yang bertentangan dengan hukum internasional.

Intervensi sering kali melibatkan penggunaan kekuatan militer, baik secara langsung maupun melalui dukungan kepada kelompok atau pihak yang berkonflik di negara yang dituju. Namun, intervensi juga dapat dilakukan melalui upaya diplomasi, tekanan politik, sanksi ekonomi, bantuan kemanusiaan, atau intervensi berbasis non-militer lainnya. Salah satu definisi mengenai intervensi adalah menurut David Carment dan Martin Rudner, ahli hubungan internasional. Mereka mendefinisikan intervensi sebagai campur tangan negara-negara asing dalam urusan domestik suatu negara untuk mempengaruhi kebijakan atau kondisi di dalamnya. Intervensi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pendekatan diplomasi dan negosiasi hingga penggunaan kekuatan militer.

Intervensi dapat memiliki motivasi yang beragam, seperti kepentingan keamanan nasional, kemanusiaan, atau ideologis. Negara yang melakukan intervensi mungkin berupaya untuk melindungi kepentingan strategis mereka, mencegah konflik regional, memperluas pengaruh politik atau ekonomi, atau mengatasi pelanggaran hak asasi manusia.

Intervensi dapat terjadi dalam konteks konflik bersenjata, seperti perang sipil atau invasi militer, atau dalam situasi yang lebih damai seperti upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau mengatasi krisis kemanusiaan. Intervensi sering kali menjadi topik kontroversial dalam hubungan internasional karena melibatkan campur tangan dalam kedaulatan suatu negara. Sementara

beberapa intervensi didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan upaya untuk melindungi populasi yang terkena dampak konflik atau penindasan, yang lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.

Intervensi dapat memiliki dampak yang kompleks dan berkepanjangan terhadap negara yang dituju, termasuk perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Selain itu, intervensi juga dapat mempengaruhi dinamika regional dan hubungan antarnegara secara lebih luas. Dalam konteks studi kasus intervensi Rusia di Suriah, penelitian akan melihat bagaimana intervensi tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia, dinamika konflik di Suriah, serta hubungan Rusia dengan negara-negara lain di kawasan tersebut.

Pemahaman tentang konsep intervensi penting dalam menganalisis dan mengkaji konflik dan dinamika hubungan internasional. Melalui studi intervensi, kita dapat memahami peran dan dampak campur tangan negara atau pihak asing dalam konflik, serta implikasi yang timbul dari tindakan tersebut. Dalam situasi di mana intervensi terjadi, penting untuk mempertimbangkan implikasi hukum internasional, prinsip kedaulatan negara, dan prinsip-prinsip etika dalam campur tangan dalam urusan domestik negara lain. Secara keseluruhan, intervensi adalah tindakan yang melibatkan campur tangan negara atau pihak asing dalam urusan internal suatu negara dengan tujuan mempengaruhi kebijakan atau kondisi di dalamnya. Intervensi dapat dilakukan melalui berbagai cara dan memiliki konsekuensi yang luas, baik dalam konteks konflik bersenjata maupun situasi

damai. Pemahaman terhadap intervensi penting dalam menganalisis hubungan internasional dan konflik global. (Yulianti, 2022)

Intervensi adalah tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu negara atau pihak luar dalam urusan internal negara lain dengan tujuan mempengaruhi keadaan politik, ekonomi, atau keamanan negara tersebut. Intervensi dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk intervensi militer, politik, ekonomi, atau diplomatik. Tujuan dari intervensi bisa bervariasi, seperti untuk melindungi kepentingan nasional, memperoleh keuntungan ekonomi, atau mendukung rezim yang dianggap sah oleh negara pihak yang melakukan intervensi.

Intervensi seringkali menjadi sumber konflik dan ketegangan antara negara-negara, karena negara yang mengalami intervensi mungkin merasa melanggar kedaulatan dan integritas nasionalnya. Meskipun beberapa intervensi bisa memiliki dampak positif, seperti membantu mengakhiri konflik atau melindungi hak asasi manusia, banyak intervensi juga menimbulkan kontroversi dan masalah baru, terutama jika tujuan dan metode intervensi tidak disetujui oleh pihak yang terkena dampaknya. Keputusan untuk melakukan intervensi adalah keputusan politik yang kompleks dan perlu mempertimbangkan banyak faktor, termasuk hukum internasional, etika, dan keseimbangan kekuatan antarnegara.

Tindakan intervensi sering kali memicu kontroversi dan perdebatan di masyarakat internasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa intervensi dapat dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia, memperbaiki situasi kemanusiaan, atau menghentikan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi. Namun, ada juga

yang berpendapat bahwa intervensi merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan dapat menciptakan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti destabilisasi politik atau perang yang lebih luas. (Silmi N. U., 2021)

Intervensi dapat dilakukan oleh satu negara atau oleh koalisi negara-negara yang memiliki kepentingan serupa. Negara-negara yang melakukan intervensi seringkali mengklaim bahwa mereka bertindak dalam kepentingan keamanan nasional atau kepentingan global yang lebih luas. Namun, ada pula intervensi yang didorong oleh motif politik, ekonomi, atau geostrategis yang mungkin tidak selalu diungkapkan secara terbuka.

Keberhasilan intervensi dalam mencapai tujuannya dapat bervariasi. Beberapa intervensi berhasil menghentikan konflik atau membawa perubahan positif dalam situasi konflik. Namun, ada juga intervensi yang gagal atau berakhir dengan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti perang yang berkepanjangan atau konflik yang lebih kompleks. Intervensi yang dilakukan tanpa mandat hukum internasional atau tanpa persetujuan dari lembaga internasional yang relevan, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, sering kali menjadi perdebatan hukum dan politik yang kompleks. Hal ini menyoroti pentingnya prinsip-prinsip hukum internasional dalam mengatur dan membatasi tindakan intervensi. (Mark Lipsey , 2000)

Permasalahan etika juga sering muncul dalam konteks intervensi. Dalam banyak kasus, intervensi melibatkan penggunaan kekuatan militer atau tindakan yang dapat berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang

terkena dampak. Pertimbangan etika, seperti proporsionalitas dan perlindungan warga sipil, menjadi penting dalam merumuskan dan mengevaluasi tindakan intervensi.

2.2 Kerangka Pemikiran

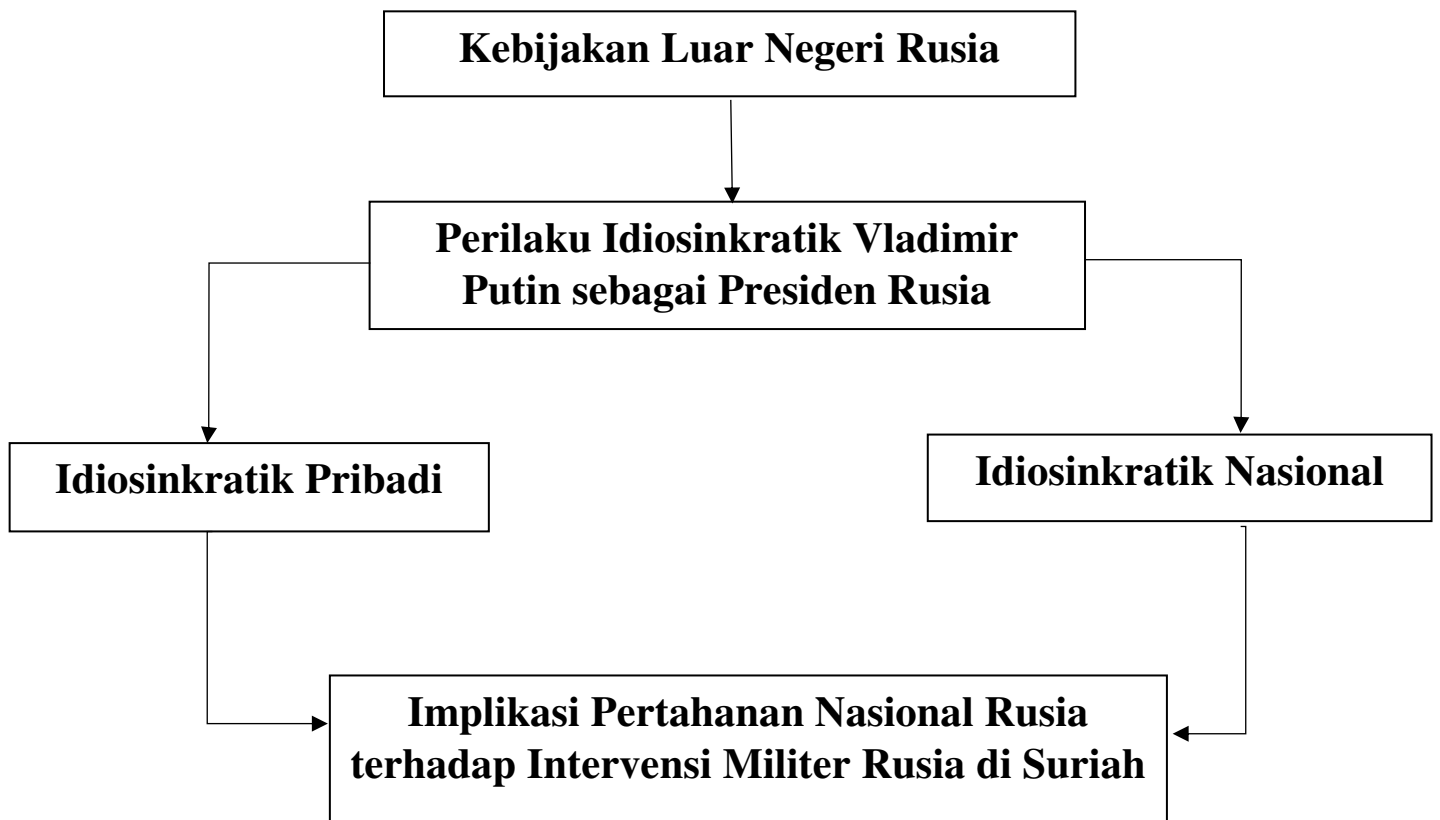
Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas utama dalam perumusan kebijakan luar negeri Rusia. Konflik di Suriah menjadi isu penting karena Suriah adalah sekutu Rusia di kawasan Timur Tengah. Dalam menghadapi konflik ini, Putin memutuskan untuk melakukan intervensi militer di Suriah sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan Rusia di kawasan tersebut.

Putin memperkuat posisi Rusia di kawasan Timur Tengah melalui dukungan militer kepada pemerintah Suriah dalam konflik tersebut. Dukungan militer ini termasuk penambahan pasukan, peralatan militer, serta bantuan logistik lainnya yang diberikan Rusia kepada Suriah. Putin melihat bahwa dengan dukungan ini, Rusia dapat mempertahankan kepentingannya di kawasan Timur Tengah serta memperkuat posisinya sebagai pemain penting di kawasan tersebut.

Intervensi militer Rusia di Suriah memperlihatkan karakteristik idiosinkratik Putin dalam perumusan kebijakan luar negeri. Putin selalu menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas utama, dan intervensi ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan Rusia di kawasan Timur Tengah. Namun, intervensi ini juga menuai kritik internasional dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah. Meski demikian,

intervensi militer Rusia di Suriah berhasil memperkuat posisi Rusia di kawasan Timur Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pengaruh politik dan diplomatik Rusia di kawasan tersebut. Dengan memperkuat posisinya di kawasan Timur Tengah, Rusia dapat mempertahankan kepentingannya di kawasan tersebut dan mengambil peran yang lebih aktif dalam masalah-masalah di kawasan tersebut.

Dengan demikian, kebijakan luar negeri Rusia di bawah kepemimpinan Putin menunjukkan karakteristik idiosinkratik yang kuat, di mana Putin selalu menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas utama. Intervensi militer Rusia di Suriah menjadi contoh konkret dari kebijakan luar negeri Rusia yang dilandasi oleh karakteristik idiosinkratik Putin, yang pada akhirnya berhasil memperkuat posisi Rusia di kawasan Timur Tengah.



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Peneliti